

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG
MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB
PAJAK BADAN PADA PERUSAHAAN
INDUSTRI MANUFAKTUR DI SEMARANG**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomi
Universitas Diponegoro

Disusun Oleh:

JATI PURBO LAKSONO
NIM. C2C607075

FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2011

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Jati Purbo Laksono
Nomor Induk Mahasiswa : C2C607075
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi

Judul Skripsi : **ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG
MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB
PAJAK BADAN PADA PERUSAHAAN
INDUSTRI MANUFAKTUR DI
SEMARANG**

Dosen Pembimbing : H. Moch. Didik Ardiyanto, SE., MSi., Akt.

Semarang, 2011

Dosen Pembimbing,

(H. Moch. Didik Ardiyanto, SE., MSi., Akt.)
NIP: 132003713

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Mahasiswa : Jati Purbo Laksono
Nomor Induk Mahasiswa : C2C607075
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi

Judul Skripsi : **ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG
MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB
PAJAK BADAN PADA PERUSAHAAN
INDUSTRI MANUFAKTUR DI
SEMARANG**

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 16 September 2011

Tim Penguji :

1. H. Moch. Didik Ardiyanto, S.E., M.Si., Akt. (.....)
2. Dr. Endang Kiswara, S.E., M.Si., Akt. (.....)
3. Tri Jatmiko Wahyu Prabowo, S.E., M.Si., Akt. (.....)

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya, Jati Purbo Laksono, menyatakan bahwa skripsi dengan judul: **ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN PADA PERUSAHAAN INDUSTRI MANUFAKTUR DI SEMARANG**, adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik sengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 2011

Yang membuat pernyataan,

(Jati Purbo Laksono)

NIM: C2C607075

ABSTRACT

This research was conducted to investigate corporate tax compliance behavior, especially large and medium size manufacturing industry in Semarang, Central Java. Large and medium manufacturing industry was selected because the company was generally has a formal accounting information system thereby enabling tax professionals preparing corporate tax reporting. Research design was a replication of Mustikasari research (2007) with the respondents location as a difference. The respondents of the research were tax professionals who have at least 1 year experience as tax professional in the manufacturing industry and ever filled SPT form. Sixty tax professionals were almost served as finance staff of 60 corporates participated in this research. The data was analysed using SPSS version 16.

This research used attitude toward compliance behavior, subjective norm, perceived behavioral control and corporate financial condition as independent variables and corporate tax compliance as dependent variable.

The findings of this research showed that, the effect of: (1) attitude toward compliance behavior on corporate tax compliance was positive and significant; (2) subjective norm on corporate tax compliance was positif and significant; (3) perceived behavioral control on corporate tax compliance was positive and significant; (4) corporate financial condition on corporate tax compliance was positif and significant.

Keywords: *attitude toward compliance behavior, subjective norm, perceived behavioral control, corporate financial condition.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perilaku kepatuhan wajib pajak badan, khususnya perusahaan industri manufaktur kelas menengah dan besar yang ada di Semarang, Jawa Tengah. Perusahaan kelas menengah dan besar dipilih karena pada umumnya perusahaan ini mempunyai sistem akuntansi formal sehingga memungkinkan *tax professional* menyusun pelaporan pajak perusahaannya. Desain penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Mustikasari (2007) dengan lokasi responden sebagai perbedaannya. Responden-responden penelitian adalah ahli pajak yang sudah memiliki pengalaman sebagai ahli pajak perusahaan industri manufaktur minimal selama 1 tahun dan pernah mengisi formulir SPT. Enampuluh ahli pajak yang kebanyakan bekerja sebagai staf keuangan dari 60 perusahaan berpartisipasi dalam penelitian ini. Data dianalisis menggunakan SPSS versi 16.

Penelitian ini menggunakan sikap terhadap kepatuhan pajak, norma subyektif, kontrol keperilakuan yang dipersepsikan dan kondisi keuangan perusahaan sebagai variabel independen dan kepatuhan pajak badan sebagai variabel dependen.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh dari: (1) sikap terhadap perilaku kepatuhan terhadap kepatuhan pajak badan adalah positif dan signifikan, (2) norma subyektif terhadap kepatuhan pajak badan adalah positif dan signifikan, (3) kontrol keperilakuan yang dipersepsikan terhadap kepatuhan pajak badan adalah positif dan signifikan, (4) kondisi keuangan perusahaan terhadap kepatuhan pajak badan adalah positif dan signifikan.

Kata kunci: sikap terhadap perilaku kepatuhan, norma subyektif, kontrol keperilakuan yang dipersepsikan, kondisi keuangan perusahaan.

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto

Anda bisa, jika Anda berpikir bisa, selama akal mengatakan bisa. Batasan apakah sesuatu masuk akal atau tidak, kita lihat saja orang lain, jika orang lain telah melakukannya atau telah mencapai impiannya, maka impian tersebut adalah masuk akal

Persembahan

Skripsi ini saya persembahkan untuk seluruh keluarga terkhusus orangtua, saudara, dan orang-orang tersayang.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Segala Puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala nikmat dan hidayah-Nya yang senantiasa memberi petunjuk, kekuatan, dan semangat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Shalawat dan Salam senantiasa tercurah kepada Nabi Besar kita Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang setia. Dan semoga kita termasuk diantara mereka.

Skripsi ini disusun dengan sebuah semangat untuk sedikit memberikan sumbangsih terhadap pengembangan kajian Ekonomi, khususnya Akuntansi. Meskipun karya ini hanyalah sebagian kecil dari ribuan karya yang lain, namun penulis berharap agar karya ini tetap memberikan sedikit kontribusi untuk penelitian selanjutnya.

Penyusunan skripsi ini pun tidak terlepas dari bantuan dan kontribusi dari berbagai pihak. Untuk itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. H. Mohamad Nasir, Msi, Akt, PhD, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Muchamad Syafruddin, MSi, Akt, selaku Ketua Jurusan Akuntansi Universitas Diponegoro Semarang.

3. Bapak H. Moch. Didik Ardiyanto, SE, MSi, Akt, selaku dosen pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan masukan serta dukungan demi terselesainya skripsi ini.
4. Bapak Drs. H. Sudarno, Msi, PhD, Akt, selaku dosen wali yang telah memberikan bimbingan selama menempuh kuliah.
5. Papah dan Mamah yang selalu memberikan perhatian dan kasih sayang serta dukungan dan doa yang tak pernah henti. Kedua kakakku tersayang, Mas Bayu & keluarga, Mba Ratri & keluarga yang selalu memberikan pelajaran tambahan dalam kehidupan, dalam proses pendewasaan. Serta semua keluarga besar yang telah membantu dan mendukung dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. Keluarga Bapak Madyono Heri Winarso beserta Ibu, Mas Arif & Mba Wina, Dek Propa yang tak henti-hentinya memberikan dukungan, motivasi, semangat dan doa.
7. Terkhusus Wina Etayani Ariatiwi atas perhatian dan kasih sayang, dukungan, semangat serta doa. Semua amarah dan ancaman-ancamanmu yang menjadikan cambuk semangat dalam menyelesaikan kuliah dan skripsi ini.
8. Teman-teman seperjuangan #HABENK & Tim Futsal #HABENK (adi, alip, arya, barkah “banjir”, dewa “hom”, randy “galau”, bimo gagap, deni ki kusumo, budi, iwan, pungky, ega, om senang, ayip “dekan PKM”, tito “boros”, seto, yho, daniadi, dwi, ageng, tito B, dhema, simox, gian).

9. Para master yang terkumpul dalam satu ikatan #CUT-OFF (ronald, mas uli, bang sam, mas udin, fauzan sodom, mas enrico, mbah dhiyaz, mas prabu, tukang, bocil).
10. N2MUStore, N2MU & Get Up and Go (fauzan, bang sam, sodom, mas udin, mas uli, ronald, yayan, kukuh, ardi, arif, zacky, erik, victor, erwin, dewa, cita, aswin, agis).
11. Teman-teman Tim I KKN PPM Undip 2011 terkhusus Desa Karangmanggis (angga, bagus, fahd, ichlas, risa, tika, shinta, retno, nurul, afni).
12. Semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Semoga Allah SWT membalas seluruh amal budi baik dengan ridha-Nya. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Semarang, 2011

Penulis

Jati Purbo Laksono

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
ABSTRACT	v
ABSTRAKSI	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.5 Sistematika Penulisan	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Landasan Teori	9
2.1.1 <i>Theory of Planned Behavior</i> (TPB)	9
2.1.2 Kepatuhan Pajak (<i>tax compliance</i>)	10
2.1.3 Sikap	15
2.1.4 Norma Subyektif	16
2.1.5 Kontrol Keperilakuan yang Dipersepsikan	17
2.1.6 Kondisi Keuangan	19
2.2 Kriteria Wajib Pajak Patuh	21
2.3 Penelitian Terdahulu	23
2.4 Kerangka Pemikiran	27
2.5 Pengembangan Hipotesis	28
2.5.1 Pengaruh Sikap Terhadap Kepatuhan Pajak terhadap Kepatuhan Pajak <i>Tax Profesional</i>	28
2.5.2 Pengaruh Norma Subyektif terhadap Kepatuhan Pajak <i>Tax Profesional</i>	29
2.5.3 Pengaruh Kontrol Keperilakuan yang Dipersepsikan terhadap Kepatuhan Pajak <i>Tax Profesional</i>	30
2.5.4 Pengaruh Persepsi tentang Kondisi Keuangan Perusahaan	

	terhadap Kepatuhan Pajak <i>Tax Profesional</i>	31
BAB III	METODOLOGI PENELITIAN	32
3.1	Variabel Penelitian	32
3.2	Definisi Operasional	32
3.2.1	Kepatuhan Pajak Badan	32
3.2.2	Sikap terhadap Kepatuhan Pajak	32
3.2.3	Norma Subyektif	33
3.2.4	Kontrol Keperilakuan yang Dipersepsikan	34
3.2.5	Kondisi Keuangan Perusahaan	35
3.3	Populasi dan Sampel Penelitian	36
3.4	Jenis dan Sumber Data	38
3.5	Metode Pengumpulan Data	38
3.6	Metode Analisis	39
3.6.1	Statistik Deskriptif	39
3.6.2	Uji Reliabilitas dan Validitas	39
3.6.2.1	Uji Reliabilitas	40
3.6.2.2	Uji Validitas	40
3.6.3	Uji Asumsi Klasik	41
3.6.3.1	Uji Normalitas	41
3.6.3.2	Uji Multikolonieritas	42
3.6.3.3	Uji Heteroskedastisitas	44
3.6.4	Model Regresi	45
3.6.5	Analisis Regresi (Pengujian Hipotesis)	45
3.6.5.1	Koefisien Determinasi (R^2)	46
3.6.5.2	Uji Signifikansi Parameter Simultan (Uji Statistik F)	47
3.6.5.3	Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)	48
BAB IV	ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN	49
4.1	Gambaran Responden	49
4.1.1	Identifikasi Responden berdasarkan Usia	49
4.1.2	Identifikasi Responden berdasarkan Jenis Kelamin	50
4.1.3	Identifikasi Responden berdasarkan Tingkat Pendidikan	50
4.1.4	Identifikasi Responden berdasarkan Pendidikan Bidang Perpajakan	51
4.1.5	Identifikasi Responden berdasarkan Lama Bekerja	51
4.1.6	Identifikasi Responden berdasarkan Pernah/ Tidak Mengisi SPT	52
4.2	Analisis Data	52

4.2.1 Uji Non Response Bias	52
4.2.2 Uji Kualitas Data	53
4.2.3 Statistik Deskriptif	56
4.2.3.1 Sikap	56
4.2.3.2 Norma Subyektif	57
4.2.3.3 Kontrol Keperilakuan yang dipersepsikan	58
4.2.3.4 Kondisi Keuangan	59
4.2.3.5 Kepatuhan Pajak	59
4.3 Hasil Analisis dan Pengujian Hipotesis	60
4.3.1 Uji Asumsi Klasik	60
4.3.1.1 Uji Normalitas	60
4.3.1.2 Uji Multikolonieritas	62
4.3.1.3 Uji Heteroskedastisitas	62
4.4 Model Regresi	64
4.4.1 Pengujian Hipotesis	65
4.4.1.1 Pengujian Hipotesis 1	65
4.4.1.2 Pengujian Hipotesis 2	65
4.4.1.3 Pengujian Hipotesis 3	66
4.4.1.4 Pengujian Hipotesis 4	66
4.4.2 Uji Model Keseluruhan (Uji F)	66
4.4.3 Koefisien Determinasi (R^2)	67
4.5 Pembahasan	68
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan	73
5.2 Keterbatasan dan Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Proporsi Penerimaan Pajak	1
Tabel 1.2 <i>Tax Ratio</i> Indonesia	2
Tabel 1.3 <i>Tax Coverage Ratio</i> Indonesia	3
Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel	35
Tabel 4.1. Hasil Penyebaran Kuesioner	49
Tabel 4.2. Identifikasi Responden berdasarkan Usia	50
Tabel 4.3. Identifikasi Responden berdasarkan Jenis Kelamin.....	50
Tabel 4.4. Identifikasi Responden berdasarkan Tingkat Pendidikan	51
Tabel 4.5. Identifikasi Responden berdasarkan Pendidikan Bidang Perpajakan	51
Tabel 4.6. Identifikasi Responden berdasarkan Lama Bekerja sebagai <i>Tax Professional</i>	52
Tabel 4.7 Identifikasi Responden berdasarkan Pernah/ Tidak Mengisi SPT.	52
Tabel 4.8 Hasil Uji Non Response Bias	53
Tabel 4.9 Hasil Uji Validitas	54
Tabel 4.10 Hasil Uji Reliabilitas	55
Tabel 4.11 Deskripsi Variabel Sikap	57
Tabel 4.12 Deskripsi Variabel Norma Subyektif	57
Tabel 4.13 Deskripsi Variabel Kontrol Perilaku yang Dipersepsikan	58
Tabel 4.14 Deskripsi Variabel Kondisi Keuangan Perusahaan	59
Tabel 4.15 Deskripsi Variabel Kepatuhan Pajak	60
Tabel 4.16 Hasil Uji Normalitas dengan menggunakan <i>One-Sample Kolmogorov-Smirnov test</i>	61
Tabel 4.17. Hasil Uji Multikolonieritas	62
Tabel 4.18. Hasil Uji Heteroskedastisitas	63
Tabel 4.19. Hasil Model Regresi	64
Tabel 4.20. Hasil Uji Model Keseluruhan (Uji F)	67
Tabel 4.21. Koefisien Determinasi (R ²)	67

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 <i>Theory of Planned Behavior</i>	10
Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran	28
Gambar 4.1 <i>Normal Probability Plot</i>	61
Gambar 4.2 <i>Scatter Plot</i>	63

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan sumber penerimaan utama negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan. Hal ini dapat dilihat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia tahun anggaran 2005 sampai dengan tahun anggaran 2009 dimana proporsi penerimaan yang berasal dari sektor pajak merupakan penerimaan dalam negeri yang paling besar terhadap seluruh pendapatan negara yaitu dijelaskan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1.1
Proporsi Penerimaan Pajak, 2005-2009
(dalam miliar rupiah)

Tahun	Penerimaan Perpajakan	Penerimaan Negara Bukan Pajak	Total	Proporsi penerimaan pajak
2005	347.031,1	146.888,5	493.919,6	70%
2006	409.203,0	226.950,2	636.153,2	64%
2007	490.988,6	215.119,7	706.108,3	70%
2008	658.700,8	320.604,6	979.305,4	67%
2009	725.843,0	258.943,6	984.786,5	74%

Sumber: www.fiskal.depkeu.go.id

Penerimaan yang berasal dari sektor pajak direncanakan akan terus ditingkatkan guna dapat terus membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan.

Langkah pemerintah untuk terus meningkatkan penerimaan dari sektor pajak yaitu dengan melakukan reformasi perpajakan dari *official assessment system* menjadi *self assessment system*. Dalam *official assessment system*

tanggung jawab pemungutan terletak sepenuhnya pada penguasa pemerintah, sedangkan dalam *self assessment system* Wajib Pajak diberi kepercayaan penuh untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan besarnya pajak yang terhutang sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan (Mustikasari, 2007). Jika memahami penjelasan dalam *self assessment system* maka penerapan *self assessment system* akan efektif apabila kondisi kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) pada masyarakat telah terbentuk (Darmayanti, 2004). Namun kenyataan yang ada di Indonesia menunjukkan tingkat kepatuhan sukarela pada masyarakat masih rendah. Hal ini dapat dilihat dari belum optimalnya penerimaan pajak yang tercermin dari *tax ratio* (perbandingan antara jumlah penerimaan pajak dibandingkan dengan produk domestik bruto (PDB) suatu negara. Angka ini merupakan sebuah rasio yang dipergunakan untuk menilai tingkat kepatuhan pembayaran pajak oleh masyarakat dalam suatu negara) dan *tax coverage ratio* (besarnya perbandingan antara jumlah pajak yang telah dipungut dengan besarnya potensi pajak yang seharusnya dapat dipungut).

Tabel 1.2
***Tax Ratio* Indonesia**

Tahun	<i>Tax Ratio</i>
2005	12,51%
2006	12,26%
2007	12,41%
2008	13,30%
2009	11,04%

Sumber: www.pajak.go.id

Tabel 1.3
***Tax Coverage Ratio* Indonesia**

Tahun	<i>Tax Coverage Ratio</i>
2005	50,2%
2006	50,9%
2007	53,5%
2008	50,6%
2009	46,0%

Sumber: www.pajak.go.id

Tax ratio Indonesia termasuk yang terendah jika dibandingkan dengan *tax ratio* rata-rata dari tahun 2005 sampai tahun 2009 negara-negara seperti Amerika Serikat (26,6%), Australia (28,9%), Austria (42,4%), Belanda (38,8%), Inggris (35,7%) dan Jepang (28%). Data lengkap mengenai *tax ratio* negara-negara di dunia disajikan pada lampiran.

Saat ini sendiri jumlah WP yang efektif terdaftar di wilayah Kanwil DJP Jateng I yang merupakan populasi data dari penelitian ini mencapai 852.271. Namun, dari jumlah WP yang efektif terdaftar tersebut hanya 422.185 yang telah menyerahkan SPT PPh tahunan hingga akhir maret 2011 dimana dari jumlah tersebut sebanyak 411.908 adalah WP Orang Pribadi dan 10.277 adalah WP Badan. Jika melihat dari data di atas berarti tingkat kepatuhan WP yang efektif terdaftar di wilayah Kanwil DJP Jateng I yaitu sebesar 49,54% dan tingkat kepatuhan tersebut pun sudah mengalami peningkatan dari tahun 2010 dimana tingkat kepatuhannya sebesar 39%.

Untuk mendukung keefektifan penerapan *self assessment system*, perlu ditumbuhkan secara terus-menerus kepatuhan masyarakat wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mengingat kepatuhan merupakan faktor penting penerapan *self assessment system* dalam peningkatan penerimaan pajak, maka perlu secara intensif dikaji tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, khususnya wajib pajak badan.

Penelitian mengenai kepatuhan pajak sudah sering dilakukan. Blanthorne (2000) dalam Mustikasari (2007) dan Bobek (2003) melakukan penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Keduanya menggunakan kerangka model *Theory of Planned Behavior (TPB)* untuk menjelaskan perilaku kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Model TPB yang digunakan dalam penelitian memberikan penjelasan yang signifikan, bahwa variabel sikap, norma subyektif, dan kontrol berperilaku yang dipersepsikan berpengaruh terhadap perilaku tidak patuh wajib pajak orang pribadi. Selanjutnya Bradley (1994) dan Siahaan (2005) melakukan penelitian kepatuhan wajib pajak badan dengan responden *tax professional* (*tax professional* adalah orang profesional di perusahaan yang ahli di bidang perpajakan). Namun penelitian yang dilakukan oleh keduanya bukan merupakan penelitian perilaku. Oleh karena itu, untuk menjelaskan perilaku WP badan yang dalam hal ini diwakili oleh *tax professional* perlu menggunakan teori perilaku individu dan perilaku organisasi. Teori perilaku yang digunakan adalah model *Theory of Planned Behavior* karena model *Theory of Planned Behavior* telah terbukti memberikan penjelasan signifikan mengenai kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Faktor lain (selain sikap, norma subyektif dan kontrol berperilaku

yang dipersepsikan) yang sangat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak badan yaitu kondisi keuangan perusahaan. Kondisi keuangan perusahaan ini tercermin dari profitabilitas dan arus kas perusahaan. Slemlord, 1992, Bradley, 1994, dan Siahaan, 2005 telah membuktikan bahwa kondisi keuangan perusahaan telah terbukti merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan perusahaan dalam mematuhi peraturan perpajakan karena profitabilitas akan menekan perusahaan untuk melaporkan pajaknya.

Berdasarkan kondisi yang telah dipaparkan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang mengkaji tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak khususnya wajib pajak badan yang dalam hal ini diwakili oleh *tax professional* dengan menggunakan model *Theory of Planned Behavior*. Penelitian dan analisis ini dikembangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul **“ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN PADA PERUSAHAAN INDUSTRI MANUFAKTUR DI SEMARANG”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka perumusan masalah dinyatakan dalam pertanyaan sebagai berikut:

1. Apakah sikap terhadap perilaku kepatuhan pajak mempengaruhi *tax professional* untuk melaksanakan kepatuhan pajak dalam melaporkan laporan pajak badan pada perusahaan industri manufaktur di Semarang?

2. Apakah norma subyektif mempengaruhi *tax professional* untuk melaksanakan kepatuhan pajak dalam melaporkan laporan pajak badan pada perusahaan industri manufaktur di Semarang?
3. Apakah kontrol berperilaku yang dipersepsikan mempengaruhi *tax professional* untuk melaksanakan kepatuhan pajak dalam melaporkan laporan pajak badan pada perusahaan industri manufaktur di Semarang?
4. Apakah kondisi keuangan perusahaan mempegaruhi *tax professional* untuk melaksanakan kepatuhan pajak dalam melaporkan laporan pajak badan pada perusahaan industri manufaktur di Semarang?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah untuk:

1. Menganalisis apakah sikap terhadap perilaku kepatuhan pajak berpengaruh terhadap *tax professional* untuk melaksanakan kepatuhan pajak dalam melaporkan laporan pajak badan pada perusahaan industri manufaktur di Semarang.
2. Menganalisis apakah norma subyektif berpengaruh terhadap *tax professional* untuk melaksanakan kepatuhan pajak dalam melaporkan laporan pajak badan pada perusahaan industri manufaktur di Semarang.
3. Menganalisis apakah kontrol berperilaku yang dipersepsikan berpengaruh terhadap *tax professional* untuk melaksanakan kepatuhan pajak dalam melaporkan laporan pajak badan pada perusahaan industri manufaktur di Semarang.

4. Menganalisis apakah kondisi keuangan perusahaan berpengaruh terhadap *tax professional* untuk melaksanakan kepatuhan pajak dalam melaporkan laporan pajak badan pada perusahaan manufaktur di Semarang.

1.4 Manfaat Penelitian

Mengacu pada hasil penelitian ini secara akademis, diharapkan dapat meningkatkan perbendaharaan pengetahuan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi niat *tax professional* untuk berperilaku patuh dalam melaporkan laporan pajak badan pada perusahaan manufaktur di Semarang. Serta dapat meningkatkan pemahaman tentang teori perpajakan dan teori yang berkaitan dengan bidang akuntansi keperilakuan tentang bagaimana aspek perilaku yang ada pada *tax professional* dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak. Sedangkan secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis bagi para pembayar pajak atau Wajib Pajak terutama Wajib Pajak Badan, para penasehat atau konsulen pajak, para pembuat Undang Undang dan Peraturan Perpajakan dalam pengembangan sistem perpajakan yang lebih baik, baik dari segi pengelolaan administrasi, maupun dari segi kewajarannya serta dapat membantu manajemen perusahaan dalam menganalisis cara-cara yang dapat memfasilitasi fungsi kepatuhan pajak perusahaan itu sendiri.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terbagi menjadi lima bab. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- BAB I** Berisi pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.
- BAB II** Berisi tinjauan pustaka yang menguraikan tentang landasan teori, bahasan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang sejenis, kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian.
- BAB III** Berisi Metode penelitian yang menguraikan tentang bagaimana penelitian akan dilakukan secara operasional yang terdiri dari variabel penelitian dan definisi operasional, penentuan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta metode analisis yang digunakan.
- BAB IV** Berisi uraian tentang hasil dan pembahasan dari penelitian yang dilakukan yang terdiri dari analisis data dan pembahasan hasil penelitian yang dilakukan.
- BAB V** Berisi kesimpulan yang diperoleh dari pembahasan sebelumnya serta saran-saran kepada pihak yang berkepentingan terhadap hasil penelitian.

BAB II

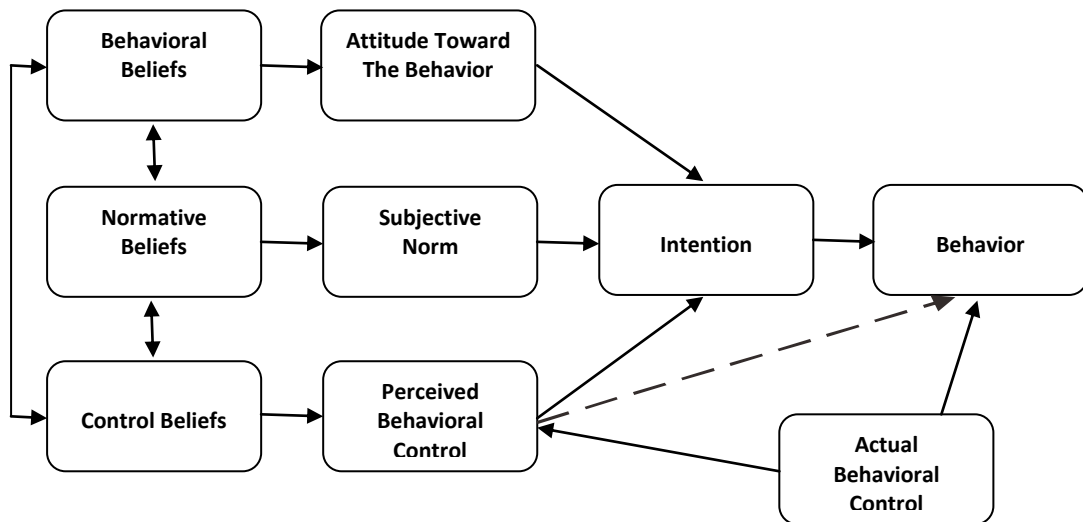
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 *Theory of Planned Behavior* (TPB)

Teori yang menjadi landasan penelitian ini adalah *Theory of Planned Behavior*. *Theory of Planned Behavior* menjelaskan bahwa adanya niat untuk berperilaku dapat menimbulkan perilaku yang ditampilkan oleh individu. Sedangkan niat untuk berperilaku itu muncul karena ditentukan oleh 3 faktor penentu yaitu: (1) *behavioral beliefs*, yaitu keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut (*beliefs strength and outcome evaluation*), (2) *normatif beliefs*, yaitu keyakinan tentang harapan normatif orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut (*normatif beliefs and motivation to comply*), dan (3) *control beliefs*, yaitu keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan (*control beliefs*) dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat perilakunya tersebut (*perceived power*). Hal-hal yang mungkin menghambat pada saat perilaku ditampilkan dapat berasal dari dalam diri sendiri maupun lingkungan. Secara berurutan, *behavioral beliefs* menghasilkan sikap positif atau negatif terhadap suatu objek, *normative beliefs* menghasilkan tekanan sosial yang dipersepsikan (*perceived social pressure*) atau norma subyektif (*subyektif norm*) dan *control beliefs* menimbulkan *perceived behavioral control* atau kontrol berperilaku yang dipersepsikan (Ajzen, 2002: 2).

Gambar 2.1
Theory of Planned Behavior



Sumber: Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50, p. 179-211

Alasan dipilihnya model kerangka *Theory of Planned Behavior* ini adalah karena model *Theory of Planned Behavior* merupakan suatu model teori perilaku yang telah terbukti memberikan penjelasan signifikan bahwa sikap, norma subyektif dan kontrol berperilaku yang dipersepsikan berpengaruh terhadap perilaku tidak patuh wajib pajak orang pribadi. Sedangkan responden yang dipilih dalam penelitian ini adalah *tax professional* yang mewakili wajib pajak badan.

2.1.2 Kepatuhan Pajak (*Tax Compliance*)

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia. "Kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan" (Badudu dan Zain, 1994; 1013). Kepatuhan adalah motivasi seseorang kelompok; atau organisasi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Perilaku kepatuhan

seseorang merupakan interaksi antara perilaku individu, kelompok dan organisasi (Robbins, 2001: 32). Sedangkan pengertian pajak, banyak para ahli memberikan definisi tentang pajak, diantaranya pengertian pajak yang dikemukakan oleh Andriani (2005: 10) dalam Sari (2011) adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang), dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintah. Menurut Siahaan (2005: 10), pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh Negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontraprestasi/balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Menurut Soemitro (2000: 8) dalam Sari (2011), pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Berdasarkan beberapa definisi pajak di atas, terdapat ciri-ciri yang mendasar yaitu:

1. Pajak merupakan iuran wajib yang dibayarkan rakyat kepada Negara.
2. Pajak dipungut berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan.
3. Pajak dapat dipaksakan tanpa mendapat kontraprestasi langsung secara individual yang diberikan oleh pemerintah.

4. Pajak digunakan untuk pembiayaan pengeluaran umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan.

Berbeda dengan definisi pajak menurut para ahli di atas, pengertian pajak menurut Meliala (2007: 4) adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang sebagai perwujudan pengabdian dan peran serta rakyat untuk membiayai Negara dan pembangunan nasional. Jadi sebenarnya pajak itu bersifat sukarela sekaligus dapat dipaksakan oleh undang-undang. Sebenarnya kedua hal ini tidak bertentangan karena pajak merupakan wujud pengabdian masyarakat kepada negaranya sesuai dengan pengamalan Pancasila sila ke-3, yaitu Persatuan Indonesia, sehingga walaupun tidak dapat dipaksakan oleh undang-undang, masyarakat tetap akan berinisiatif membayar pajak dengan sukarela.

Internal Revenue Service (IRS) (dalam Mustikasari 2007) mendefinisikan *Tax Compliance* sebagai "*accurate, timely and fully paid return without IRS enforcement effort*". Dengan demikian *Tax Compliance* dapat didefinisikan sebagai memasukkan dan melaporkan pada waktunya informasi yang diperlukan; mengisi secara benar jumlah pajak terutang dan membayar pajak pada waktunya tanpa adanya tindakan pemaksaan.

Berdasarkan pemahaman atas definisi kepatuhan pajak seperti yang diungkapkan di atas, maka diharapkan semua warga negara dapat lebih patuh dalam membayar pajak sehingga dapat memenuhi fungsi dari pajak. Fungsi pajak menurut Indrawati (2006: 167) dibagi menjadi:

- a. Fungsi Penerimaan (*Budgetair*)

Fungsi pajak terletak di sektor publik sebagai sumber dana atau sarana untuk mengumpulkan uang pajak sebanyak-banyaknya, sesuai undang-undang yang berlaku pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.

b. Fungsi Mengatur (*Regulated*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu yang letaknya di luar bidang keuangan, seperti di bidang ekonomi, sosial dan lain sebagainya.

c. Fungsi Demokrasi

Pajak sebagai fungsi demokrasi adalah fungsi yang merupakan salah satu pengeluaran atau wujud salah satu sistem gotong royong, termasuk kegiatan pemerintah.

d. Fungsi Distribusi

Fungsi distribusi yaitu suatu fungsi yang lebih menekankan unsur pemerataan dan keadilan masyarakat.

Permasalahan tentang *Tax Compliance* merupakan permasalahan lama dalam bidang perpajakan. James et al (1998) dalam Mustikasari (2007) menggunakan berbagai perspektif dalam membahas permasalahan dalam bidang perpajakan, perspektif tersebut diantaranya keuangan publik, penegakan hukum, persediaan tenaga kerja, etika dan kombinasi dari perspektif tersebut. Sebelum tahun 1982, literatur akademis empiris tentang *Tax Compliance* masih sangat sedikit dan penelitian tersebut menggunakan desain survey. Responden yang disurvei adalah pembayar pajak untuk mengetahui perilaku mereka.

Perkembangan berikutnya setelah tahun 1980'an riset tentang kepatuhan kebanyakan menggunakan desain eksperimental.

Jackson dan Milliron (1986) dalam Mustikasari (2007) telah melakukan *review literature* yang menyeluruh terhadap penelitian yang berkaitan dengan *Tax Compliance*. Mereka kemudian mengidentifikasi 14 variabel yang paling sering menjadi fokus penelitian dan ditemukan mempengaruhi perilaku kepatuhan pembayar pajak yaitu umur, jenis kelamin, pendidikan, tingkat pendapatan, sumber pendapatan, pekerjaan, kepatuhan rekan kerja, keadilan, kontak dengan IRS, sanksi, etika, kemungkinan terdeteksi dan tarif pajak. Berdasarkan hasil *review* tersebut, Fischer et al (dalam Bobek dan Hatfield, 2003) mengklasifikasikan ke 14 variabel yang mempengaruhi perilaku kepatuhan dalam 4 golongan besar (1) demografi (misalnya: jenis kelamin, umur), (2) kesempatan ketidakpatuhan (misalnya: tingkat pendapatan, sumber pendapatan), (3) Sikap (misalnya: etika, keadilan), (4) Struktural (kompleksitas, kemungkinan pemeriksaan).

Walaupun beberapa laporan atau artikel, baik yang diterbitkan oleh instansi pemerintah maupun majalah ilmiah menunjukkan bahwa masih banyak perusahaan yang tidak mematuhi peraturan perpajakan, akan tetapi masih relatif sedikit penelitian secara akademis melakukan pengujian secara ilmiah terhadap fenomena tersebut untuk perusahaan yang berskala kecil.

The General Accounting Office (1990) dalam Siahaan (2005) telah menemukan bahwa perusahaan manufaktur memiliki tingkat kepatuhan terhadap peraturan perpajakan yang relatif lebih tinggi bila dibandingkan dengan

perusahaan jasa (*service*) dan dagang eceran (*retail*). Rice (1992) dalam Siahaan (2005) telah melakukan penelitian terhadap tingkat kepatuhan perusahaan-perusahaan kecil terhadap peraturan perpajakan. Rice menemukan bahwa 2/3 dari perusahaan kecil yang diteliti tidak mematuhi peraturan perpajakan. Faktor-faktor yang signifikan yang ditemukan dalam hubungannya dengan tingkat kepatuhan perusahaan-perusahaan kecil terhadap peraturan perpajakan adalah pengungkapan laporan keuangan kepada publik (memiliki hubungan positif), *Marginal Tax Rate* (memiliki hubungan negatif), ukuran perusahaan (memiliki hubungan positif) dan lokasi yang diidentifikasi oleh IRS yang masuk dalam *Poor Compliance Region* (memiliki hubungan negatif).

Mustikasari (2007) dalam artikelnya menjelaskan mengenai beberapa variabel yang berpengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung (melalui niat berperilaku) terhadap kepatuhan pajak, antara lain sikap terhadap ketidakpatuhan pajak, norma subyektif, kewajiban moral, kontrol berperilaku yang dipersepsikan, niat berperilaku, kondisi keuangan, fasilitas perusahaan dan iklim keorganisasian. Dalam penelitian ini lebih menjelaskan mengenai pengaruh sikap terhadap kepatuhan pajak, norma subyektif, kontrol berperilaku yang dipersepsikan dan persepsi tentang kondisi keuangan perusahaan.

2.1.3 Sikap

Sikap merupakan suatu bentuk evaluasi atau reaksi perasaan terhadap suatu obyek. Menurut Thurstone (1931) dalam Jatmiko (2006), sikap dipandang sebagai perasaan baik memihak atau melawan suatu objek psikologis. Sedangkan

menurut Berkowitz (1972) dalam Darmayanti (2004), sikap seseorang terhadap suatu objek adalah perasaan mendukung atau memihak (*favorable*) maupun perasaan tidak mendukung atau tidak memihak (*unfavorable*) pada objek tersebut.

Fishbein dan Ajzen (dalam Refiana, 2002) berpendapat bahwa sikap seseorang terhadap perilaku tertentu didasarkan pada sekumpulan pasangan keyakinan (*belief-evaluation*). Sikap merupakan fungsi perilaku, termasuk keyakinan perilaku (*behavioral belief*) seseorang dan evaluasi terhadap konsekuensinya.

Sikap berperan penting dalam menjelaskan perilaku seseorang dalam lingkungannya. Selain komponen sikap juga masih banyak komponen lain yang mempengaruhi perilaku seseorang antara lain stimulus, latar belakang individu, motivasi, dan status kepribadian. Sedangkan lingkungan itu sendiri serta sikap dan perilaku seseorang secara timbal balik saling mempengaruhi.

2.1.4 Norma Subyektif

Norma Subyektif adalah determinan persepsi individu tentang pengaruh sosial dalam membentuk perilaku tertentu. (Ajzen, 1988 dalam Mustikasari, 2007). Norma adalah konvensi sosial yang mengatur kehidupan manusia. Norma subyektif merupakan fungsi dari harapan yang dipersepsikan individu dimana satu atau lebih orang di sekitarnya (misalnya saudara, teman sejawat) untuk menyetujui atau tidak menyetujui suatu perilaku tertentu dan memotivasi individu tersebut untuk mematuhi mereka (Ajzen, 1991 dalam Mustikasari, 2007).

Norma subyektif merupakan persepsi yang bersifat individual terhadap tekanan sosial untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku tertentu. Norma subyektif dapat ditentukan dan diukur sebagai suatu kumpulan keyakinan normatif mengenai kesetujuan atau ketidaksetujuan acuan yang signifikan terhadap suatu perilaku (Refiana, 2002). Seorang individu akan melakukan suatu perilaku tertentu apabila persepsi orang lain terhadap perilaku tersebut bersifat positif.

Penelitian tentang kepatuhan Wajib Pajak yang lalu menunjukkan, bahwa teman sejawat mempunyai pengaruh penting untuk memprediksi perilaku Wajib Pajak (Jackson dan Milliron, 1986; Roth et al., 1989; Steenbergen, McGraw and Scholz, 1992 dalam Mustikasari, 2007). Bobek & Hatfield (2003) dan Hanno & Violette (1996) telah membuktikan secara empiris bahwa norma subjektif secara positif signifikan mempengaruhi niat ketidakpatuhan Wajib Pajak. Indikator subjektif yang digunakan oleh Bobek & Hatfield (2003) adalah: anggota keluarga, pimpinan perusahaan, teman, pasangan, sedangkan Hanno & Violette (1996) menggunakan indikator keluarga.

2.1.5 Kontrol Keperilakuan yang Dipersepsikan

Kontrol keperilakuan yang dipersepsikan dalam konteks perpajakan adalah seberapa kuat tingkat kendali yang dimiliki seorang wajib pajak dalam menampilkan perilaku tertentu, seperti melaporkan penghasilannya lebih rendah, mengurangi beban yang seharusnya tidak boleh dikurangkan ke penghasilan, dan perilaku ketidakpatuhan lainnya (Bobek dan Hatfield, 2003). Kontrol

keperilakuan yang dipersepsikan ini memiliki dua pengaruh yaitu pengaruh terhadap niat berperilaku dan terhadap perilaku.

Ajzen (2002) mengatakan bahwa kontrol keperilakuan mempengaruhi niat didasarkan atas asumsi bahwa kontrol keperilakuan yang dipersepsikan oleh individu akan memberikan implikasi motivasi pada orang tersebut. Dalam arti bahwa, niat akan terbentuk apabila individu merasa mampu untuk menampilkan perilaku. Bobek dan Hatfield (2003) dan Blanthorne (2000) dalam Mustikasari (2007), dalam penelitiannya tidak bisa membuktikan bahwa pengaruh kontrol keperilakuan yang dipersepsikan cukup signifikan. Pengaruh langsung dapat terjadi jika terdapat *actual control* di luar kehendak individu sehingga mempengaruhi perilaku.

Semakin positif sikap terhadap perilaku dan norma subyektif, semakin besar kontrol yang dipersepsikan seseorang, maka semakin kuat nilai seseorang untuk memunculkan perilaku tertentu. Akhirnya, sesuai dengan kondisi pengendalian yang nyata di lapangan (*actual behavioral control*) niat tersebut akan diwujudkan jika kesempatan itu muncul. Namun sebaliknya, perilaku yang dimunculkan bisa jadi bertentangan dengan niat individu tersebut. Hal tersebut terjadi karena kondisi di lapangan tidak memungkinkan memunculkan perilaku yang telah diniatkan sehingga dengan cepat akan mempengaruhi *perceived behavioral control* individu tersebut. *Perceived behavioral control* yang telah berubah akan mempengaruhi perilaku yang ditampilkan sehingga tidak sama lagi dengan yang diniatkan. Hasil penelitian Bobek dan Hatfield (2003) dan Blanthorne (2000) dalam Mustikasari (2007), menemukan bahwa kontrol

keperilakuan yang dipersepsikan terhadap ketidakpatuhan pajak tidak cukup signifikan.

Kontrol keperilakuan yang dipersepsikan juga mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung (melalui niat) terhadap perilaku (Ajzen, 1988). Pengaruh langsung dapat terjadi jika terdapat *actual control* di luar kehendak individu sehingga mempengaruhi perilaku.

Sikap terhadap perilaku dan norma subyektif, kontrol keperilakuan yang dipersepsikan serta niat seseorang mempunyai keterkaitan yang saling berpengaruh. Semakin positif sikap terhadap perilaku dan norma subyektif, semakin besar kontrol keperilakuan yang dipersepsikan seseorang, maka semakin kuat niat seseorang untuk memunculkan perilaku tertentu. Akhirnya, sesuai dengan kondisi pengendalian yang nyata di lapangan (*actual behavioral control*) niat tersebut akan diwujudkan jika kesempatan itu muncul. Namun sebaliknya, perilaku yang dimunculkan dapat jadi bertentangan dengan niat individu tersebut. Hal tersebut terjadi karena kondisi di lapangan tidak memungkinkan memunculkan perilaku yang telah diniatkan sehingga dengan cepat akan mempengaruhi *perceived behavioral control* individu tersebut. *Perceived behavioral control* yang telah berubah akan mempengaruhi perilaku yang ditampilkan sehingga tidak sama lagi dengan yang diniatkan (Mustikasari, 2007).

2.1.6 Kondisi Keuangan

Kondisi keuangan dapat didefinisikan dengan kemampuan keuangan perusahaan yang tercermin dari tingkat profitabilitas (*profitability*) dan arus kas

(*cash flow*). Sebuah perusahaan yang mempunyai tingkat profitabilitas tinggi tidak menjamin likuiditasnya baik. Hal ini dimungkinkan karena rasio profitabilitas dihitung dari laba akuntansi dibagi dengan investasi, aset, atau ekuitas, yang mana laba akuntansi menganut basis akrual. Oleh karena itu, untuk mengukur kondisi keuangan perusahaan, selain profitabilitas, ukuran penting yang lain adalah arus kas.

Profitabilitas perusahaan (*firm profitability*) telah terbukti merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan perusahaan dalam mematuhi peraturan perpajakan karena profitabilitas akan menekan perusahaan untuk melaporkan pajaknya (Slemrod, 1992, Bradley, 1994, dan Sahaan, 2005). Perusahaan yang mempunyai profitabilitas tinggi cenderung melaporkan pajaknya dengan jujur dari pada perusahaan yang mempunyai profitabilitas rendah. Perusahaan dengan profitabilitas rendah pada umumnya mengalami kesulitan keuangan (*financial difficulty*) dan cenderung melakukan ketidakpatuhan pajak.

Demikian juga perusahaan yang mengalami kesulitan likuiditas ada kemungkinan tidak mematuhi peraturan perpajakan dalam upaya untuk mempertahankan arus kasnya. Pada sisi yang lain suatu perusahaan yang memiliki penghasilan bersih di atas rata-rata mungkin memiliki dorongan untuk tidak mematuhi kewajiban pajaknya dalam upaya untuk meminimalkan *political visibility* (Slemrod; Watts dan Zimmerman, dalam Sahaan, 2005 dan Bradley, 2004).

2.2 Kriteria Wajib Pajak Patuh

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 192/PMK.03/2007 tentang tata cara penetapan wajib pajak dengan kriteria tertentu dalam rangka pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak dalam pasal 1 disebutkan bahwa wajib pajak dengan kriteria tertentu yang selanjutnya disebut sebagai wajib pajak patuh adalah wajib pajak yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Tepat waktu dalam penyampaian Surat Pemberitahuan;
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pajak;
3. Laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; dan
4. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Sehubungan dengan penerbitan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak, Direktur Jenderal Pajak mengeluarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-2/PJ./2008 tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu. Dalam surat edaran tersebut tertera definisi wajib pajak patuh dan juga

kriteria wajib pajak patuh yang tertuang dalam bagian I nomor 1 dan 2 sebagai berikut:

1. Wajib Pajak Patuh adalah Wajib Pajak yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak sebagai Wajib Pajak yang memenuhi kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.
2. Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak adalah:
 - a. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan, meliputi:
 1. Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan tepat waktu dalam 3 (tiga) tahun terakhir;
 2. Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat dalam tahun terakhir untuk Masa Pajak Januari sampai November tidak lebih dari 3 (tiga) Masa Pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut; dan
 3. Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat sebagaimana dimaksud pada butir 2 telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Masa pajak berikutnya;

- b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak, meliputi keadaan pada tanggal 31 Desember tahun sebelum penetapan sebagai wajib pajak patuh dan tidak termasuk utang pajak yang belum melewati batas akhir pelunasan.
- c. Laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, dengan ketentuan:
 - 1. Laporan keuangan yang diaudit harus disusun dalam bentuk panjang (*long form report*) dan menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersial dan fiskal bagi wajib pajak yang wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan; dan
 - 2. Pendapat Akuntan atas Laporan Keuangan yang diaudit ditandatangani oleh Akuntan Publik yang tidak sedang dalam pembinaan lembaga pemerintah pengawas Akuntan Publik; dan
- d. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

2.3 Penelitian Terdahulu

Jackson dan Milliron (1986) dalam Mustikasari (2007), telah melakukan *review literature* yang menyeluruh terhadap penelitian yang berkaitan dengan *tax*

compliance. Mereka kemudian mengidentifikasi 14 variabel yang paling sering menjadi fokus penelitian dan ditemukan mempengaruhi perilaku kepatuhan pembayar pajak yaitu umur, jenis kelamin, pendidikan, tingkat pendapatan, sumber pendapatan, pekerjaan kepatuhan teman sejawat, keadilan, kontak dengan IRS, sanksi, etika, kemungkinan terdeteksi dan tarif pajak. Penelitian ini menunjukkan bahwa teman sejawat mempunyai pengaruh penting untuk memprediksi perilaku Wajib Pajak.

Penelitian Hite (1988) dalam Siahaan (2005) yang berjudul “*The Effect of Peer Reporting Behavior on Tax Payer Compliance*” bertujuan untuk meneliti pengaruh perilaku pelaporan teman sesama pembayar pajak (*peers*) terhadap kepatuhan pembayaran pajak. Sembilan puluh tujuh (97) responden berpartisipasi secara sukarela dalam penelitian ini. Sebanyak 65% responden penelitian mengindikasikan bahwa para pembayar pajak melaporkan lebih rendah pendapatan mereka, dan 54% menyatakan bahwa keridakpatuhan mereka disebabkan karena mereka mengetahui bahwa teman mereka sesama pembayar pajak tidak patuh.

Klepper dan Nagin (1989) dalam Siahaan (2005) melaporkan hasil penelitian dalam artikelnya yang berjudul “*Tax Compliance and Perception of The Risks of Detection and Criminal Prosecution*” yang bertujuan untuk mengkaji pengaruh persepsi resiko terdeteksi dan tuntutan kriminal terhadap kepatuhan pajak serta mengkaji dampak persepsi tersebut terhadap perilaku ketidakpatuhan. Temuan mereka menunjukkan bahwa pembayar pajak sensitif terhadap dampak perilaku ketidakpatuhan mereka terhadap resiko terdeteksi dan tuntutan kriminal

dan bahwa resiko tersebut mempunyai pengaruh penting terhadap keinginan mereka untuk melakukan ketidakpatuhan. Temuan ini mengindikasikan bahwa pembayar pajak selalu menimbang atau menghitung manfaat dan biaya ketidakpatuhan, tetapi perhitungan mereka nampak mematuhi realitas institusional tentang proses penegakan hukum.

Disertasi Bradley (1994) yang berjudul “*An Empirical Investigation of Factors Affecting Corporate Tax Compliance Behavior*” bertujuan untuk (1) mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan apajak (kompleksitas peraturan perpajakan, lingkungan perusahaan, tekanan keuangan, biaya ketidakpatuhan, resiko penyesuaian pemeriksaan dan profil individu), (2) mengembangkan skala untuk mengukur faktor-faktor tersebut, (3) menguji pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap kepatuhan pajak. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa semua variabel independen (kompleksitas peraturan perpajakan, lingkungan perusahaan, tekanan keuangan, biaya ketidakpatuhan, resiko penyesuaian pemeriksaan dan profil individu) berpengaruh signifikan terhadap perilaku kepatuhan *tax professional*.

Hanno dan Violette (1996) memanfaatkan *Theory of Planned Behavior* untuk menjelaskan *tax compliance* Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP). Hasil penelitian menemukan bahwa sikap, niat, norma subyektif dan kewajiban moral berpengaruh positif signifikan terhadap ketidakpatuhan pajak.

Blanthorne (2000) dalam Mustikasari (2007), telah melakukan penelitian tentang ketidakpatuhan pajak yang menggunakan *Theory of Planned Behavior* sebagai dasar untuk pengembangan hipotesisnya. Penelitian ini melibatkan

variabel sikap, niat, norma subyektif dan kewajiban moral sebagai variabel independen yang mempengaruhi variabel ketidakpatuhan pajak sebagai variabel dependen. Namun, dalam penelitian ini Blanthorne (2005) tidak dapat membuktikan pengaruh sikap terhadap ketidakpatuhan terhadap niat karena model pengukuran sikap yang digunakan tidak valid.

Bobek dan Hatfield (2003) melaporkan hasil penelitiannya yang berjudul “*An Investigation of The Theory of Planned Behavior and The Role of Moral Obligation in Tax Compliance*”. Penelitian ini menggunakan *Theory of Planned Behavior* sebagai dasar untuk pengembangan hipotesisnya. Temuan penelitian ini adalah sikap, niat, norma subyektif dan kewajiban moral berpengaruh positif signifikan terhadap ketidakpatuhan pajak. Hasil penelitian ini juga menemukan bahwa kontrol berperilaku yang dipersepsikan terhadap ketidakpatuhan pajak tidak cukup signifikan.

Vardi (2001) dalam Mustikasari (2007), secara empiris telah membuktikan bahwa iklim keorganisasian berpengaruh secara signifikan terhadap perilaku *Organizational Misbehavior* (OMB).

Siahaan (2005) dalam disertasinya yang berjudul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Kepatuhan *Tax professional* dalam Pelaporan Pajak Badan pada Perusahaan Manufaktur di Surabaya” telah membuktikan bahwa profitabilitas perusahaan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan perusahaan dalam mematuhi peraturan perpajakan karena profitabilitas akan menekan perusahaan untuk melaporkan pajaknya. Selain itu siahaan (2005)

juga memberikan bukti empiris bahwa fasilitas perusahaan berpengaruh secara positif signifikan terhadap kewajiban wajib pajak Badan.

Mustikasari (2007), dalam penelitiannya yang berjudul “Kajian Empiris tentang Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Perusahaan Industri Pengolahan di Surabaya” telah membuktikan bahwa iklim keorganisasian yang positif berpengaruh terhadap kepatuhan pajak badan.

Penelitian saat ini menggabungkan penelitian-penelitian terdahulu yang menjadi penelitian merupakan pengkajian ulang terhadap penelitian Mustikasari (2007). Namun, pada penelitian ini terdapat perbedaan yaitu pada populasi penelitian dimana populasi yang dijadikan obyek penelitian adalah perusahaan manufaktur yang terdapat di Semarang, sedangkan populasi data pada penelitian Mustikasari yaitu industri pengolahan di Surabaya.

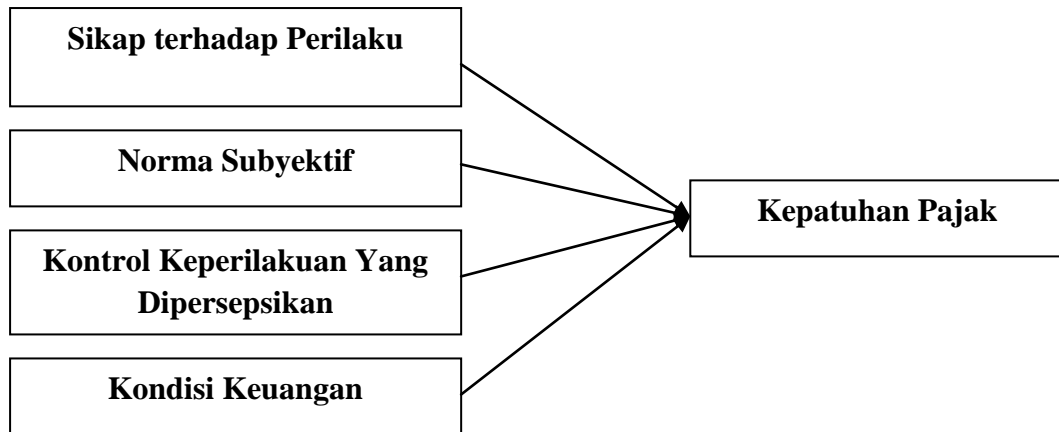
2.4 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak badan. Gambar menyajikan kerangka pemikiran untuk pengembangan hipotesis pada penelitian ini.

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen yang digunakan yaitu, sikap, norma subyektif, kontrol berperilaku yang dipersepsikan dan persepsi tentang kondisi keuangan perusahaan. Sedangkan variabel dependen yaitu kepatuhan pajak.

Kerangka Pemikiran

Gambar 2.2



2.5 Pengembangan Hipotesis

2.5.1 Sikap Terhadap Perilaku

Menurut Jalaluddin Rakhmat (1996: 39), sikap adalah kecenderungan bertindak, berpersepsi, berpikir, dan merasa dalam menghadapi objek, ide, situasi, atau nilai. Sikap seseorang terhadap suatu objek adalah perasaan mendukung atau memihak (*favorable*) maupun perasaan tidak mendukung atau tidak memihak (*unfavorable*) pada objek tersebut (Berkowitz, 1972 dalam Darmayanti, 2004). Sikap bukan merupakan suatu perilaku, tetapi sikap merupakan reaksi maupun persepsi seseorang untuk mendukung atau memihak maupun tidak mendukung atau tidak memihak atas suatu objek. Reaksi yang ditimbulkan atas suatu objek dapat berasal dari diri sendiri dan juga dari orang lain. Jika seseorang mempunyai sikap yang mendukung atas suatu objek maka cenderung akan melakukan suatu perilaku yang berpengaruh positif terhadap objek yang didukung, namun sebaliknya, jika seseorang mempunyai sikap. Seorang *tax professional* yang memiliki sikap mendukung terhadap perilaku kepatuhan pajak maka cenderung

berperilaku patuh terhadap pajak. Sebaliknya, jika seorang *tax professional* memiliki sikap yang tidak mendukung terhadap kepatuhan pajak, maka cenderung untuk tidak melaksanakan kepatuhan pajak.

Berdasarkan pemahaman di atas, maka dapat disimpulkan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H1 : Sikap terhadap perilaku kepatuhan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak *tax professional*

2.5.2 Norma Subyektif

Norma Subyektif adalah persepsi individu tentang pengaruh sosial dalam membentuk perilaku tertentu (Ajzen, 1988). Norma subyektif merupakan fungsi dari harapan yang dipersepsikan individu dimana satu atau lebih orang di sekitarnya (misalnya, saudara, teman sejawat) menyetujui perilaku tertentu dan memotivasi individu tersebut untuk mematuhi mereka (Ajzen, 1991). Norma subyektif dibangun melalui tekanan sosial dan pengaruh orang-orang sekitar *tax professional* yang dianggap penting, contohnya petugas pajak dan pimpinan perusahaan. Jika orang-orang di sekitar *tax professional* yang dianggap penting memiliki sikap positif terhadap kepatuhan pajak, maka *tax professional* tersebut akan patuh membayar pajak. Sebaliknya, jika orang-orang di sekitar *tax professional* yang dianggap penting memiliki sikap negatif terhadap kepatuhan pajak, maka *tax professional* akan menghindari pajak.

Berdasarkan pemahaman di atas, maka dapat disimpulkan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H2 : Norma Subyektif berpengaruh terhadap kepatuhan pajak *tax professional*

2.5.3 Kontrol Keperilakuan Yang Dipersepsikan

Kontrol keperilakuan yang dipersepsikan mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung (melalui niat) terhadap perilaku (Ajzen, 1988). Pengaruh langsung dapat terjadi jika terdapat *actual control* di luar kehendak individu sehingga mempengaruhi perilaku.

Semakin positif sikap terhadap perilaku dan norma subyektif, semakin besar kontrol yang dipersepsikan seseorang, maka semakin kuat niat seseorang untuk memunculkan perilaku tertentu. Akhirnya, sesuai dengan kondisi pengendalian yang nyata di lapangan (*actual behavioral control*) niat tersebut akan diwujudkan jika kesempatan itu muncul. Namun, perilaku yang dimunculkan bisa jadi bertentangan dengan niat individu tersebut. Pertentangan antara perilaku dan niat dapat dikarenakan oleh kondisi lapangan yang tidak memungkinkan seseorang untuk memunculkan perilaku yang telah diniatkan sehingga dengan cepat akan mempengaruhi *perceive behavioal control* individu tersebut. *Perceived behavioral control* tersebut yang telah berubah akan mempengaruhi perilaku yang ditampilkan sehingga tidak sama lagi dengan yang diniatkan.

Berdasarkan pemahaman di atas, maka dapat disimpulkan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H3 : Kontrol keperilakuan yang dipersepsikan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak *tax professional*

2.5.4 Kondisi Keuangan Perusahaan

Kondisi keuangan adalah kemampuan keuangan perusahaan yang tercermin dari tingkat profitabilitas (*profitability*) dan arus kas (*cash flow*). Profitabilitas perusahaan telah terbukti merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan perusahaan dalam mematuhi peraturan perpajakan karena profitabilitas akan menekan perusahaan untuk melaporkan pajaknya (Slemrod, 1992, Bradley, 1994, dan Siahaan, 2005). Perusahaan yang mempunyai profitabilitas tinggi cenderung melaporkan pajaknya dengan jujur daripada perusahaan yang mempunyai profitabilitas rendah. Perusahaan dengan profitabilitas rendah pada umumnya mengalami kesulitan keuangan (*financial difficulty*) dan cenderung melakukan ketidakpatuhan pajak.

Demikian juga perusahaan yang mengalami kesulitan likuiditas memungkinkan untuk tidak mematuhi peraturan perpajakan dalam upaya mempertahankan arus kasnya. Suatu perusahaan yang memiliki penghasilan bersih di atas rata-rata mungkin memiliki dorongan untuk tidak mematuhi kewajiban pajaknya dalam upaya meminimalkan *political visibility* (Slemrod; Watts dan Zimmerman, dalam Siahaan, 2005 dan Bradley, 2004).

Berdasarkan pemahaman di atas, maka dapat disimpulkan hipotesis dari penelitian sebagai berikut:

H4 : Persepsi tentang kondisi keuangan perusahaan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak *tax professional*

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Variabel Penelitian

Model yang dibangun dalam penelitian ini melibatkan 4 variabel independen yang diidentifikasi mempengaruhi kepatuhan *tax professional* yaitu: (1) sikap, (2) norma subyektif, (3) kontrol berperilaku yang dipersepsikan, (4) persepsi tentang kondisi keuangan.

3.2 Definisi Operasional

3.2.1 Kepatuhan Pajak Badan

Kepatuhan pajak badan adalah kepatuhan *tax professional* dalam memenuhi kewajiban perpajakan perusahaan dimana dia bekerja. Variabel ini diukur dengan menggunakan instrumen replikasi penelitian Brown dan Mazur (2003) dalam Mustikasari (2007) yang terdiri dari delapan pertanyaan yang menggunakan skala Likert 7 poin. Instrumen ini sesuai dengan definisi kepatuhan pajak IRS yang terdiri dari 3 variabel: (1) kepatuhan penyerahan SPT (*filing compliance*), (2) kepatuhan pembayaran (*payment compliance*), dan (3) kepatuhan pelaporan (*reporting compliance*). Indikator ketiga variabel kepatuhan mengacu pada definisi kepatuhan material pada KMK No.235/KMK.03/2003 tentang kriteria Wajib Pajak Patuh dalam rangka pendahuluan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

3.2.2 Sikap Terhadap Perilaku Kepatuhan Pajak

Sikap adalah aspek perasaan yang dimiliki oleh *tax professional* yang ditentukan secara langsung oleh keyakinan yang dimiliki oleh *tax professional* terhadap perilaku kepatuhan pajak. Sikap adalah suatu bentuk evaluasi atau reaksi perasaan. Sikap seseorang terhadap suatu objek adalah perasaan mendukung atau memihak (*favorable*) maupun perasaan tidak mendukung atau tidak memihak (*unfavorable*) pada objek tersebut. Agar dapat diukur, variabel sikap terhadap kepatuhan pajak dinilai dengan skala Likert 7 poin yang menggunakan kerangka penilaian-harapan (*valuation-expectancy framework*). Pernyataan pertama untuk mengukur *beliefs strength*, responden ditanya tentang seberapa tinggi mereka memberi "nilai (*value*)" setiap keyakinan (*belief*) yang dituangkan dalam pernyataan atau seberapa penting peran indikator tersebut dalam pengambilan keputusan ketidakpatuhan pajak. Pernyataan kedua berkaitan dengan *outcome evaluation*, responden diminta untuk menentukan "tingkat harapan (*rate of expectancy*)" masing-masing indikator mulai dari sangat dipertimbangkan sampai dengan sangat tidak dipertimbangkan dalam perilaku mereka. Secara matematis Ajzen (2006) memberikan formula sikap dalam persamaan sebagai berikut: $AB = \sum b_i e_i$ dimana $AB = attitude\ toward\ the\ behavior$, $b = belief\ strength$, dan $e = outcome\ evaluation$.

3.2.3 Norma Subyektif

Norma subyektif terhadap kepatuhan pajak adalah kekuatan pengaruh pandangan orang-orang di sekitar *tax professional* terhadap perilaku kepatuhan

pajak *tax professional*. Seseorang dapat terpengaruh atau tidak terpengaruh, sangat tergantung dari kekuatan kepribadian orang yang bersangkutan dalam menghadapi orang lain. Pengukuran variabel norma subyektif menggunakan 2 pernyataan yang mengacu pada kuesioner yang digunakan oleh Mustikasari (2007) dengan berdasarkan pada indikator norma subyektif yang diperoleh dari hasil *exploratory test* yang dilakukan oleh Mustikasari (2007). Indikator norma subyektif yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengaruh teman, pengaruh konsultan pajak dan pengaruh petugas pajak. Pernyataan pertama berkaitan dengan *normative beliefs*, dan yang kedua, berkaitan dengan *motivation to comply*.

3.2.4 Kontrol Keperilakuan Yang Dipersepsikan

Kontrol keperilakuan yang dipersepsikan adalah sejumlah kontrol yang diyakini *tax professional* yang akan menghambat mereka dalam menampilkan perilaku ketidakpatuhan pajak. Pengukuran variabel kontrol keperilakuan yang dipersepsikan yaitu dengan menggunakan 2 pernyataan yang mengacu pada kuesioner yang digunakan oleh Mustikasari (2007) dengan berdasarkan pada indikator norma subyektif yang diperoleh dari hasil *exploratory test* yang dilakukan oleh Mustikasari (2007). Indikator kontrol keperilakuan yang dipersepsikan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain kemungkinan *tax professional* diperiksa oleh fiskus pajak, kemungkinan *tax professional* dikenai sanksi perpajakan dan kemungkinan pelaporan oleh pihak ketiga. Pernyataan

pertama berkaitan dengan *control beliefs strength* dan pernyataan kedua berkaitan dengan *control beliefs power*.

3.2.5 Kondisi Keuangan Perusahaan

Kondisi keuangan adalah kemampuan keuangan perusahaan yang tercermin dari tingkat profitabilitas (*profitability*) dan arus kas (*cash flow*). Sedangkan persepsi tentang kondisi keuangan perusahaan adalah persepsi *tax professional* tentang kemampuan perusahaan di mana *tax professional* bekerja. Pengukuran variabel ini menggunakan data primer yang berasal dari kuesioner yang dinilai dengan skala Likert 7 poin dengan memodifikasi instrumen yang dikembangkan oleh Bradley (1994) dan Siahaan (2005) yang terdiri dari 2 pernyataan.

Tabel 3.1
Definisi Operasional Variabel

Variabel	Dimensi	Indikator	Skala Pengukuran
Sikap (X1)	Perilaku Kepatuhan Pajak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keinginan membayar pajak sesuai dengan yang seharusnya 2. Pembentukan dana cadangan untuk pemeriksaan pajak 3. Perasaan pemanfaatan pajak yang transparan 4. Perasaan diuntungkan oleh sistem pajak 5. Biaya suap ke fiskus lebih besar dibandingkan dengan 	Skala Ordinal

		pajak yang bisa dihemat	
Norma Subyektif (X2)	Pengaruh dan Tekanan Sosial	1. Pengaruh Teman 2. Pengaruh Konsultan Pajak 3. Pengaruh Petugas Pajak	Skala Ordinal
Kontrol Keperilakuan yang Dipersepsikan (X3)	Kontrol Perilaku yang Nyata di lapangan	1. Kemungkinan diperiksa Pihak Fiskus 2. Kemungkinan dikenai sanksi 3. Kemungkinan Pelaporan oleh Pihak Ketiga	Skala Ordinal
Kondisi Keuangan Perusahaan (X4)	Profitabilitas dan Arus Kas	1. Kondisi arus kas tahun terakhir 2. Laba sebelum pajak tahun terakhir	Skala Ordinal
Kepatuhan Pajak (Y)	Kepatuhan Pajak <i>tax professional</i>	1. Kepatuhan penyerahan SPT (<i>filing compliance</i>) 2. Kepatuhan pembayaran (<i>payment compliance</i>) 3. Kepatuhan pelaporan (<i>reporting compliance</i>)	Skala Ordinal

3.3 Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi penelitian ini adalah seluruh *tax professional* yang bekerja di perusahaan industri manufaktur kelas menengah dan besar yang ada di Semarang. Alasan pemilihan *tax professional* adalah (1) *tax professional* dianggap paling mengetahui tentang peraturan perpajakan dan penyusunan pelaporan pajak badan, dan (2) Pembayar pajak menggunakan bantuan *tax professional* untuk berbagai

macam alasan, antara lain untuk menghitung jumlah pajak yang harus dibayar, mengurangi kewajiban pajaknya dan meminimumkan biaya yang berkaitan dengan perpajakan. Sedangkan alasan pemilihan perusahaan industri manufaktur kelas menengah dan besar karena perusahaan tersebut umumnya sudah memiliki sistem informasi akuntansi formal (Bouwens dan Abernethy, 2000 dalam Mustikasari, 2007) sehingga memungkinkan *tax professional* dapat menyusun pelaporan pajak badannya. Kriteria perusahaan industri manufaktur kelas menengah sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pasal 6 ayat 3 adalah sebagai berikut:

- a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Sedangkan untuk kriteria perusahaan industri manufaktur kelas besar berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 adalah perusahaan yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah). Data mengenai perusahaan industri menengah dan besar di Semarang Tahun 2010 disajikan pada lampiran.

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah teknik *incidental sampling*. Teknik *incidental sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan yaitu siapa saja yang secara *incidental* bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, apabila orang yang kebetulan ditemui cocok sebagai sumber data (Amirin, 2009). Dalam penelitian ini responden yang menjadi sampel adalah *tax professional* yang termasuk populasi penelitian dengan kriteria: (1) Telah menjabat minimal 1 tahun, dan (2) Pernah mengisi SPT.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer, yaitu data diperoleh secara langsung dari sumber aslinya dan tidak melalui media perantara (Sugiyono, 2004 dalam Jatmiko, 2006). Data diperoleh dari jawaban para *tax professional* yaitu jawaban terhadap serangkaian pertanyaan kuesioner yang diajukan dari peneliti mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan cara yang digunakan peneliti untuk memperoleh fakta mengenai variabel yang diteliti (Azwar, 1997). Pada penelitian ini fakta yang diungkap merupakan fakta aktual yaitu data yang diperoleh dari subjek dengan anggapan bahwa memang subjeklah yang lebih mengetahui keadaan sebenarnya dan peneliti berasumsi bahwa informasi yang

diberikan oleh subjek adalah benar (Azwar, 1997). Selanjutnya, untuk mengungkap fakta aktual tersebut peneliti menggunakan kuesioner.

Kuesioner adalah daftar pertanyaan yang harus dijawab dan atau daftar isian yang harus diisi oleh responden. Kuesioner penelitian ini disebar ke beberapa perusahaan industri manufaktur kelas menengah dan besar di Semarang. Responden akan menilai setiap pernyataan dengan menggunakan skala Likert 7 poin, dari persepsi responden bahwa responden sangat tidak setuju/sangat tidak dipertimbangkan sampai dengan sangat setuju/sangat dipertimbangkan terhadap suatu pernyataan yang ada dalam kuesioner.

3.6 Metode Analisis

Penyelesaian penelitian ini dengan menggunakan teknik analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif dilakukan dengan cara menganalisis suatu permasalahan yang diwujudkan dengan kuantitatif. Dalam penelitian ini, karena data yang digunakan adalah data kualitatif, maka analisis kuantitatif dilakukan dengan cara mengkuantifikasi data-data penelitian ke dalam bentuk angka-angka dengan menggunakan skala Likert 7 poin (*7 poin Likert Scale*).

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Uji T dan Uji Anova dengan program SPSS versi 16.00 *for Windows*. Alasan penggunaan alat analisis persamaan penelitian linier berganda adalah karena persamaan penelitian berganda cocok digunakan untuk analisis faktor-faktor. Beberapa langkah yang dilakukan dalam analisis persamaan penelitian linier berganda adalah sebagai berikut :

3.6.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan penjelasan gambaran umum demografi responden penelitian dan deskripsi mengenai variabel-variabel penelitian untuk mengetahui distribusi frekuensi absolut yang menunjukkan minimal, maksimal, rata-rata (*mean*), median, dan penyimpangan baku (standar deviasi) dari masing-masing variabel penelitian.

3.6.2 Uji Reliabilitas dan Validitas

Untuk menguji apakah konstruk yang telah dirumuskan reliabel dan valid, maka perlu dilakukan pengujian reliabilitas dan validitas.

3.6.2.1 Uji Reliabilitas

Adalah pengujian untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Menurut Azwar (1997) reliabilitas adalah sejauhmana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya dan dapat memberikan hasil yang relatif tidak berbeda apabila dilakukan kembali kepada subyek yang sama.

Pengukuran reliabilitas dalam penelitian ini dilakukan dengan cara *one shot* (pengukuran sekali saja). Disini pengukuran variabelnya dilakukan sekali dan kemudian hasilnya dibandingkan dengan pertanyaan lain untuk mengukur korelasi antar jawaban pertanyaan. Suatu kostruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach Alpha* $> 0,600$ (Nunnally, 1967 dalam Ghozali 2005).

3.6.2.2 Uji Validitas

Validitas berasal dari kata *validity* yang mempunyai arti sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya (Azwar, 1997). Uji validitas kuesioner dengan menggunakan teknik korelasi *Product Moment* dari Pearson (Azwar, 1997), yaitu mengkorelasikan skor item dengan skor total. Perhitungan koefisien korelasi antara item dengan skor total akan mengakibatkan *over estimate* terhadap korelasi yang sebenarnya, maka perlu dilakukan koreksi dengan menggunakan *part-whole* (Azwar, 1997).

Selanjutnya untuk mengetahui apakah suatu item valid atau gugur maka dilakukan perbandingan antara koefisien r hitung dengan koefisien r tabel. Jika r hitung $>$ r tabel berarti item valid. Sebaliknya jika r hitung $<$ r tabel berarti item tidak valid (gugur).

3.6.3 Uji Asumsi Klasik

3.6.3.1 Uji Normalitas

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model persamaan penelitian, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik atau uji statistik. (Ghozali, 2005)

Apabila menggunakan grafik, normalitas umumnya dideteksi dengan melihat tabel histogram. Namun demikian, dengan hanya melihat tabel histogram bisa menyesatkan, khususnya untuk jumlah sampel yang kecil. Metode yang lebih handal adalah dengan melihat *normal probability plot* yang membandingkan distribusi kumulatif dari data sesungguhnya dengan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Dasar pengambilan dengan menggunakan *normal probability plot* adalah sebagai berikut: (Ghozali, 2005)

1. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model persamaan penelitian memenuhi asumsi normalitas.
2. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan/atau tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model persamaan penelitian tidak memenuhi asumsi normalitas

Uji normalitas dengan grafik dapat menyesatkan kalau tidak hati-hati secara visual kelihatan normal, padahal secara statistik bisa sebaliknya. Oleh sebab itu dianjurkan disamping uji grafik dilengkapi dengan uji statistik. Uji statistik yang dapat digunakan untuk menguji normalitas residual adalah uji statistik non-parametik Kolgomorov-Smirnov (K-S). Uji K-S dilakukan dengan membuat hipotesis:

H_0 : Data residual berdistribusi normal

H_A : Data residual tidak berdistribusi normal

3.6.3.2 Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model persamaan penelitian ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model persamaan penelitian yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolonieritas di dalam model persamaan penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Nilai R² yang dihasilkan oleh suatu estimasi model persamaan penelitian empiris sangat tinggi, tetapi secara individual variabel-variabel independen banyak yang tidak signifikan mempengaruhi variabel dependen.
- b. Menganalisis matrik korelasi variabel-variabel independen. Jika antar variabel independen ada korelasi yang cukup tinggi (umumnya di atas 0.90), maka hal ini merupakan indikasi adanya multikolonieritas. Multikolonieritas dapat disebabkan karena adanya efek kombinasi dua atau lebih variabel independen.
- c. Multikolonieritas dapat juga dilihat dari (1) nilai tolerance dan lawannya (2) *variance inflation factor* (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Dalam pengertian sederhana setiap variabel independen menjadi variabel dependen (terikat) dan diregres terhadap variabel independen lainnya. Tolerance mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih

yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai tolerance yang rendah sama dengan VIF yang tinggi (karena $VIF = 1/\text{tolerance}$). Nilai *cutoff* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolonieritas adalah nilai tolerance $< 0,10$ atau sama dengan nilai VIF > 10 . Setiap peneliti harus menentukan tingkat kolonieritas yang masih dapat ditolerir. Sebagai misal nilai tolerance = 0,10 sama dengan tingkat kolonieritas 0,95. Walaupun multikolonieritas dapat dideteksi dengan nilai tolerance dan VIF, tetapi kita masih tetap tidak mengetahui variabel-variabel independen mana sajakah yang paling berkolerasi.

3.6.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model persamaan penelitian terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model persamaan penelitian yang baik adalah yang Homoskedastisitas atau tidak terjadi Heteroskedastisitas. Kebanyakan data *crosssection* mengandung situasi heteroskedastisitas karena data ini menghimpun data yang mewakili berbagai ukuran (kecil, sedang, dan besar).

Dalam penelitian ini, uji yang digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya Heteroskedastisitas adalah dengan dua cara yaitu dengan menggunakan uji Glejser dan uji grafik *Scatter Plot*. Uji Glejser dilakukan dengan meregresnilai

absolut residual terhadap variabel independen (Gujarati, 2003 dalam Ghozali, 2005) dengan persamaan persamaan penelitian

$$|U_t| = \alpha + \beta X_t + v_t \dots\dots\dots (1)$$

Uji Heteroskedastisitas dengan cara melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik *Scatter Plot* antara SRESID dan ZPRED di mana sumbu y adalah y yang telah diprediksi, dan sumbu x adalah residual (y prediksi –y sesungguhnya) yang telah di-studentized. Dasar analisisnya adalah sebagai berikut (Ghozali, 2005):

- a. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas
- b. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

3.6.4 Model Persamaan penelitian

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis persamaan penelitian berganda yaitu melihat pengaruh sikap terhadap kepatuhan pajak, norma subyektif, kontrol berperilaku yang dipersepsikan dan kondisi keuangan perusahaan terhadap kepatuhan pajak badan. Model persamaan penelitian yang digunakan dapat dirumuskan dengan persamaan sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e \dots\dots\dots (2)$$

Keterangan:

Y = kepatuhan pajak badan

α = Bilangan konstanta

$\beta_1 \dots \beta_n$ = Koefisien arah persamaan penelitian

X1 = Sikap terhadap kepatuhan pajak

X2 = norma subyektif

X3 = kontrol berperilaku yang dipersepsikan

X4 = kondisi keuangan perusahaan

e = kesalahan pengganggu (*disturbance's error*)

3.6.5 Analisis Persamaan penelitian (Pengujian Hipotesis)

Analisis persamaan penelitian digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih dan untuk menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen. Variabel dependen diasumsikan random atau stokastik, yang berarti mempunyai distribusi probabilistik. Variabel independen diasumsikan memiliki nilai tetap (dalam pengambilan sampel yang berulang).

Ketepatan fungsi persamaan penelitian sampel dalam menaksir nilai aktual dapat diukur dari nilai *goodness of fit*-nya. Secara statistik, setidaknya ini dapat diukur dari nilai koefisien determinasi, nilai statistik F, dan nilai statistik t. Perhitungan statistik disebut signifikan secara statistik apabila nilai uji statistiknya berada dalam daerah kritis (daerah dimana H_0 ditolak). Sebaliknya disebut tidak signifikan apabila nilai uji statistiknya berada dalam daerah dimana H_0 diterima. Adapun pengujian yang dilakukan dalam analisis persamaan penelitian linier berganda dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

3.6.5.1 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen.

Kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi adalah bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model. Setiap tambahan satu variabel independen, maka R^2 pasti meningkat tidak peduli apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Oleh karena itu banyak peneliti menganjurkan untuk menggunakan nilai *adjusted* R^2 pada saat mengevaluasi mana model persamaan penelitian yang terbaik. Nilai *adjusted* R^2 dapat naik atau turun apabila satu variabel independen ditambahkan ke dalam model. Dalam kenyataan nilai *adjusted* R^2 dapat bernilai negatif, walaupun yang dikehendaki harus bernilai positif. Menurut Gujarati, 2003 (dikutip dari Ghazali, 2005) jika dalam uji empiris didapatkan nilai *adjusted* R^2 negatif, maka nilai *adjusted* R^2 dianggap bernilai nol.

3.6.5.2 Uji Signifikansi Parameter Simultan (Uji Statistik F)

Uji Statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-

sama terhadap variabel dependen. Hipotesis nol yang hendak diuji adalah apakah semua parameter secara simultan sama dengan nol.

$$H_0 : b_1 = b_2 = \dots = b_k = 0 \dots \dots \dots (3)$$

Artinya apakah semua variabel independen bukan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen. Hipotesis alternatifnya (H_A) adalah tidak semua parameter secara simultan sama dengan nol.

$$H_A : b_1 \neq b_2 \neq \dots \neq b_k \neq 0 \dots \dots \dots (4)$$

Artinya apakah semua variabel independen merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen.

3.6.5.3 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Hipotesis nol (H_0) yang hendak diuji adalah apakah suatu parameter (b_i) sama dengan nol, atau :

$$H_0 : b_i = 0 \dots \dots \dots (5)$$

Artinya adalah apakah suatu variabel independen bukan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen. Hipotesis alternatifnya (H_A) parameter suatu variabel tidak sama dengan nol, atau :

$$H_A : b_i \neq 0 \dots \dots \dots (6)$$

Artinya variabel tersebut merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen.